



BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 22 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan kegiatan untuk menjamin kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien dan bersasaran, sehingga tercapai tujuan pembangunan Daerah yang berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Purworejo, diperlukan perencanaan secara holistik, integratif, spasial dan tematik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa untuk memberikan pedoman perencanaan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Purworejo Tahun 2026, diperlukan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun anggaran yang dimulai pada 1 Januari 2026 dan berakhir pada 31 Desember 2026.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 yang selanjutnya disebut Renja PD Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun anggaran yang dimulai pada 1 Januari 2026 dan berakhir pada 31 Desember 2026.

Pasal 2

- (1) Dokumen Renja PD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah
- (2) Dokumen Renja PD Tahun 2026 disusun berpedoman kepada rancangan rencana strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan RKPD Tahun 2026.

Pasal 3

- (1) Renja PD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. bab I : pendahuluan;
 - b. bab II : hasil evaluasi rencana kerja perangkat daerah tahun lalu;
 - c. bab III : tujuan dan sasaran perangkat daerah;
 - d. bab IV : rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah; dan
 - e. bab V : penutup.
- (2) Dokumen Renja PD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

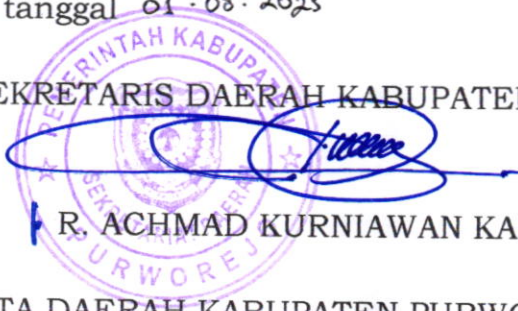
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal



Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 01.08.2025

P.j SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,



R. ACHMAD KURNIAWAN KADIR

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN NOMOR SERI NOMOR

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan rencana Kerja Pemerintah Daerah. Proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah terdiri dari enam tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, penyusunan awal, penyusunan, pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah, perumusan dan penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan tahapan yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah yang definitive. Selanjutnya Rencana Kerja Perangkat Daerah dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, kemudian menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk Menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja untuk periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Rencana Kerja Kecamatan Banyuurip merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo.

Penyempurnaan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah mencakup perumusan penajaman penyelarasan program dan kegiatan Perangkat Daerah dengan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang RKPD tahun 2026 tingkat Kecamatan, penyelarasan indikator serta target program dan kegiatan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan. Dalam Menyusun Rencana Kerja Kecamatan Banyuurip Tahun 2026 juga berpedoman pada Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Renstra Tahun 2021-2026 yang bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam Rencana Kerja dengan Perubahan Rencana Strategis. Hasil perumusan Rencana Kerja disajikan dengan sistematika yang meliputi: pendahuluan, hasil evaluasi rencana Kerja tahun lalu, tujuan dan sasaran, rencana kerja pendanaan dan penutup.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, bahwa keterpaduan pola Perencanaan Pembangunan Daerah menjadi poin yang penting dalam siklus penyelenggaraan pemerintahan. Keterkaitan seluruh dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Rencana yang menjadi pedoman Panjang Daerah adalah dokumen yang menjadi pedoman dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah. Sebagai bahan masukan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah Rencana Strategis Perangkat Daerah. Selanjutnya setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disahkan maka menjadi acuan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai dokumen perencanaan tahunan. Rencana Kerja Pemerintah Daerah digunakan sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Berkaitan dengan itu, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan pedoman akhir untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berkenaan dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo tahun 2026.

Kecamatan Banyuurip selaku Perangkat Daerah juga berkewajiban Menyusun Rencana Kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Banyuurip. Rencana Kerja merupakan penjabaran dari Rencana Strategis dan dalam penyusunannya mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja Anggaran dimaksud selanjutnya menjadi salah satu acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Kecamatan Banyuurip Tahun 2026 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2026 dan merupakan penjabaran dari Perubahan Ketiga Rencana Strategis Kecamatan Banyuurip Tahun 2021-2026, tujuan yang sesuai dengan Kecamatan adalah sebagai berikut:

TUJUAN :

“ Meningkatkan Kualitas Layanan kepada Masyarakat Serta Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah “

SASARAN :

“ Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat “

Rencana Kerja Kecamatan banyuurip tahun 2026 berisi program dan kegiatan, indikator kinerja, target capaian program dan kegiatan, pendanaan indikatif, evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya dan prakiraan maju. Dalam penyusunan Rencana Kerja maka ada beberapa hal yang dilakukan yaitu pengolahan data, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, review

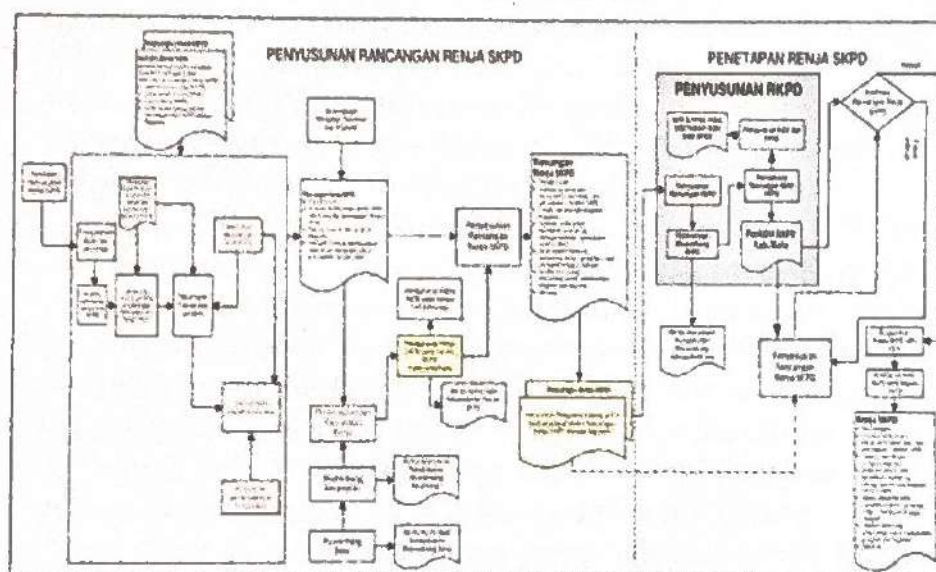
terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan.

Kecamatan Banyuurip mengapresiasi tuntunan kinerja tersebut dengan Menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2026, yaitu Rencana Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Banyuurip selama tahun anggaran 2026.

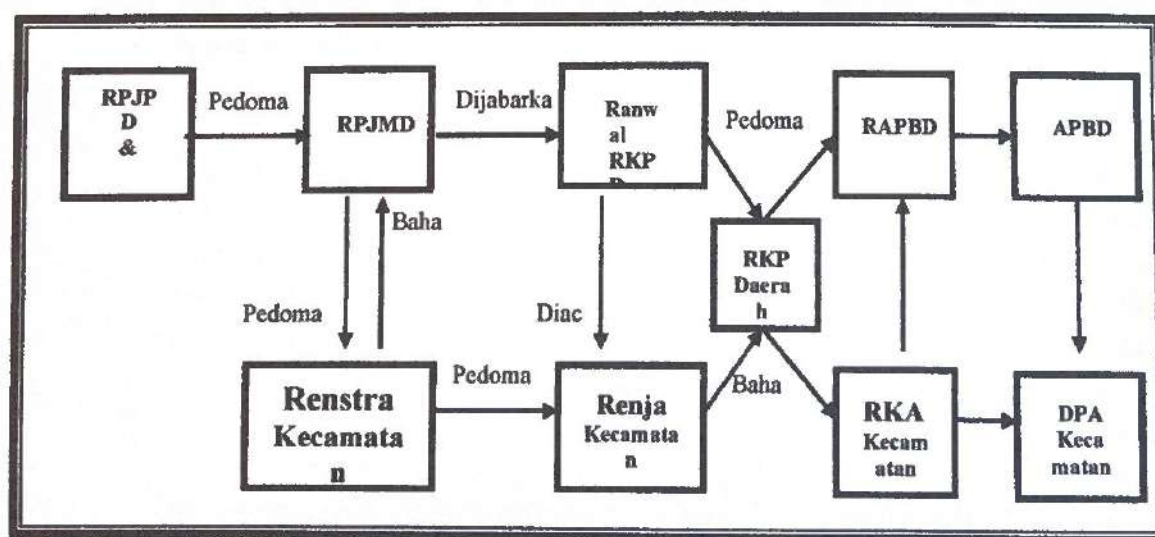
Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) OPD Kecamatan Banyuurip tahun 2026 akan menjadi dokumen rujukan dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2026, penyusunan RKA dan DPA 2026 Kecamatan Banyuurip.

Untuk lebih jelas, proses penyusunan Renja dapat dilihat pada Gambar di bawah ini :

Gambar 1.1



KETERKAITAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN



Selanjutnya Rencana Kerja Kecamatan Banyuurip Tahun 2026 ini akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Banyuurip Tahun 2026, serta menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama Tahun 2026 dan selanjutnya akan

dievaluasi melalui penilaian terhadap realisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Banyuurip untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, dan penyerapan anggaran.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dalam Kepmendagri No 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 21 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 13);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2021-2026 Kabupaten Purworejo (lembaran daerah kabupaten purworejo tahun 2021 nomor 14);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 10);
16. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo.
17. Peraturan Bupati Nomor 152 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kecamatan Banyuurip Kabupaten Tahun 2021-2026 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 37 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 152 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026.
18. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2026;

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 MAKSUD

Rencana Kerja Kecamatan Banyuurip Tahun 2026 ini disusun dengan maksud untuk memberikan gambaran tentang rencana program kegiatan yang akan dilaksanakan dengan mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam Perangkat Daerah serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah dan usulan program kegiatan yang dapat dilaksanakan pada tahun berikutnya.

1.3.2 TUJUAN

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Banyuurip Tahun 2026 adalah:

Mengarahkan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun;
Mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan Kecamatan Banyuurip Tahun 2026 dengan target dan sasaran Pembangunan Daerah sebagaimana terumus dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purwoerjo Tahun 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika Rencana Kerja Kecamatan Banyuurip Tahun 2026 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Pelaksanaan evaluasi sebagai sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan sesuai target kinerja dalam Renja Kecamatan Banyuurip Tahun 2025 didasarkan pada Renstra Kecamatan Banyuurip Tahun 2021-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purworejo Tahun 2021- 2026, untuk mengetahui :

- a. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
- b. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
- c. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dalam penyusunan program dan kegiatan telah ditetapkan indikator kinerja program (*outcome*) dan kegiatan (*output*) serta target kinerja capaian program/kegiatan maupun realisasi. Pada Tahun 2024 Kecamatan Banyuurip melaksanakan 6 program, 15 kegiatan dan 47 Sub Kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut dialokasikan sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Tingkat capaian target kinerja program/kegiatan yang telah ditetapkan Tahun 2024 dapat terealisasi 100%. Sedangkan tingkat capaian kinerja program/kegiatan menunjukkan kinerja yang baik dan tercapai 95,57%.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun lalu berdasarkan tingkat capaian kinerja program/kegiatan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Adapun capaian target dan realisasi kinerja program Kecamatan Banyuurip Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini mempunyai tujuan agar penunjang urusan pemerintahan daerah berfungsi dengan baik dapat menunjang kelancaran pelaksanaan tugas kantor.

- a) Faktor-faktor yang mendukung kegagalan/keberhasilan pencapaian indikator Program.
 - Perencanaan anggaran mendekati tepat dengan desain kegiatan, dibuktikan dengan capaian kinerja sampai dengan Desember sebesar 100%, artinya semua kebutuhan sampai dengan bulan Desember dapat tercukupi. Untuk Keuangan 96,65% Dengan rencana anggaran Rp. 4.089.271.330 dan realisasi anggaran Rp. 3.952.320.586 realisasi anggaran kurang maksimal dikarenakan adalah adanya efisiensi anggaran karena tidak tercapainya target pendapatan daerah.

- b) Hambatan / masalah
 - Kebutuhan anggaran kegiatan perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah penyerapan anggaran kurang maksimal dikarenakan dalam pelaksanaan sub kegiatan bersamaan dengan sub kegiatan lain .
- c) Solusi yang dilakukan
 - Dilakukan perhitungan perencanaan yang lebih rinci.
- 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program ke 2 ini mempunyai tujuan agar terselenggaranya pemerintahan dan pelayanan publik, untuk itu dilakukan koordinasi dan fasilitasi terkait pemerintahan demi mendukung kinerja Kecamatan Banyuurip

 - A) Faktor-faktor yang mendukung kegagalan/keberhasilan pencapaian indikator Program
 - Secara umum pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kegiatan Pemerintahan terlaksana dengan baik ketercapaian kinerja program 100%, secara Perencanaan anggaran sudah tepat dengan desain kegiatan namun untuk penyerapan kurang maksimal target anggaran Rp. 13.691.600. Adapunrealisasinya adalah Rp. 13.691.600 realisasi keuangan 100 % hal ini mendekati dengan perencanaan kebutuhan yang ada.
 - b) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program ke 3 ini bertujuan terlaksananya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan khususnya di Kecamatan Banyuurip, sehingga meningkatkan taraf hidup masyarakat

 - a) Faktor-faktor yang mendukung kegagalan/keberhasilan pencapaian indikator Program
 - Perencanaan anggaran sudah mendekati tepat dengan desain kegiatan. Dengan rencana anggaran Rp. 1.798.479.150 dan realisasi anggaran Rp. 1.666.115.450 realisasi anggaran 86,82 % dan fisik 100 %.
 - b) Hambatan / masalah
 - Tingkat pemahaman dan SDM perangkat desa yang satu dengan yang lainnya berbeda.
 - Kurangnya kesadaran masyarakat dalam keikutsertaan dalam acara pemberdayaan yang diselenggarakan Kecamatan
 - c) Solusi
 - Pembinaan Perangkat Desa untuk meningkatkan SDM
 - Dalam setiap bulannya dilakukan rapat koordinasi dengan Aparatur Desa di Kecamatan
- 3. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - a) Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan Kegiatan yakni Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sehingga, Faktor-faktor yang mendukung kegagalan/keberhasilan pencapaian indikator Program:
 - Perencanaan anggaran sudah tepat dengan desain kegiatan, dibuktikan dengan capaian kinerja 100% dan keuangan 99,13%, Rencana anggaran Rp. 15.016.200 adapun realisasinya Rp. 14.885.600.

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

a) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Faktor-faktor yang mendukung kegagalan/keberhasilan pencapaian indikator Program:

- Perencanaan anggaran sudah tepat dengan desain kegiatan, dibuktikan dengan capaian kinerja baik fisik maupun keuangan 100%. Rencana anggaran Rp. 41.077.600 adapun realisasinya Rp. 41.077.600;

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Program ke 6 ini mempunyai tujuan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.

a) Faktor-faktor yang mendukung kegagalan/keberhasilan pencapaian indikator program

- Perencanaan anggaran sudah tepat dengan desain kegiatan. Kondisi dan regulasi kadang berubah, harus menyesuaikan dengan pelaksanaannya. Rencana Anggaran Rp. 141.135.600 dan realisasinya Rp. 141.020.800.

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Banyuurip dan Pencapaian Renstra Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo s/d Tahun 2024 dapat diuraikan dalam tabel 2.2 (Tabel T-C.29)

TABEL T.C 29
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan
Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra
Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Kecamatan Banyuurip

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi (Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Th. 2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=10/4
7					Urusan Unsur Kewilayahan									
7	01				Bidang Urusan Kecamatan									
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	01	01	201		Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35 Dokumen	7 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	100%	7 dokumen	21 Dokumen	60%
7	01	01	201	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	75 dokumen	15 dokumen	15 dokumen	15 dokumen	100%	15 Dokumen	45 Dokumen	60%
7	01	01	201	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	60%
7	01	01	201	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	60%
7	01	01	201	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	60%

7	01	01	201	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	60%
7	01	01	201	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	80 laporan	16 laporan	16 laporan	16 laporan	100%	16 Laporan	48 Laporan	60%
7	01	01	201	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	100%	6 Dokumen	18 Dokumen	60%
7	01	01	202		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlayannya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	01	01	202	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	225 orang/bulan	39 orang/bulan	39 orang/bulan	39 orang/bulan	100%	39 orang/bulan	135 orang/bulan	60%
7	01	01	202	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	12 dokumen	0	0	100%	0	12 dokumen	100%
7	01	01	202	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	24 laporan	0	6 laporan	6 laporan	100%	6 laporan	12 Laporan	50%
7	01	01	202	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	130 laporan	26 laporan	26 laporan	26 laporan	100%	26 laporan	78 Laporan	60%
7	01	01	204		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Terlayannya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	01	01	204	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Dokumen	0	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	2 Dokumen	50%
7	01	01	205		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	01	01	205	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	0	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	2 Dokumen	50%

7	01	01	205	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	24 orang / kali	0	6 orang / kali	6 orang / kali	0%	6 orang / kali	12 orang / kali	30%
7	01	01	206		Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlayannya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	01	01	206	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Layanan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	3 paket	60%
7	01	01	206	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Layanan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	3 paket	60%
7	01	01	206	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Layanan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	3 paket	60%
7	01	01	206	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Layanan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	3 paket	60%
7	01	01	206	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Layanan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	3 Dokumen	60%
7	01	01	206	07	Penyediaan Bahan/Material	Layanan Penyediaan Bahan/Material	5 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	3 paket	60%
7	01	01	206	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Layanan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	36 laporan	60%
7	01	01	207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Diadakannya Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	26 jenis	0	2 jenis	0	0%	0	0	8%
7	01	01	207	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 unit	0	1 unit	1 unit	0%	0	1 unit	100%
7	01	01	207	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 unit	0	1 unit	1 unit	0%	0	1 unit	100%
7	01	01	208		Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100%	3 Laporan	9 Laporan	60%
7	01	01	208	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa Surat Menyurat	12 laporan	12 laporan	0	0	100%	0	12 laporan	100%
7	01	01	208	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	36 laporan	60%
7	01	01	208	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor	60 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	36 laporan	60%
7	01	01	209		Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Barang milik daerah (BMD) penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	20 jenis	4 jenis	4 jenis	4 jenis	100%	4 jenis	12 jenis	60%

[illegible]

7	01	03	201		Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Hasil Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	60%
7	01	03	201	03	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Hasil Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 Laporan	3 Laporan	60%
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7	01	04	201		Kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	3 Dokumen	60%
7	01	04	201	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	5 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 Laporan	3 Laporan	60%
7	01	04	202		Kegiatan : Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Tersusunnya Dokumen Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	5 Dokumen	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	60%
7	01	04	202	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Pemangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	5 laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	3 Laporan	60%
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	60%
7	01	05	201		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	9 Dokumen	1 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 Dokumen	5 dokumen	55%
7	01	05	201	01	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Hasil Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	3 dokumen	60%
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	01	06	201		Kegiatan : Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Hasil Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	41 Dokumen	10 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	100%	7 Dokumen	25 Dokumen	60%

7	01	06	201	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Desa yang menetapkan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Tepat waktu	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	3 dokumen	60%
7	01	06	201	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Desa Tertib Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	3 dokumen	60%
7	01	06	201	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Desa tertib Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	1 dokumen	1 dokumen	0	0	100%	0	1 Dokumen	100%
7	01	06	201	05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	3 dokumen	60%
7	01	06	201	07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	3 dokumen	60%
7	01	06	201	08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	3 dokumen	60%
7	01	06	201	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Hasil Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	3 dokumen	60%
7	01	06	201	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	1 dokumen	1 dokumen	0	0	100%	0	1 Dokumen	100%
7	01	06	201	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Desa yang menyusun rencana pembangunan secara Partisipatif	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	3 dokumen	60%
7	01	06	201	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1 dokumen	1 dokumen	0	0	100%	0	1 Dokumen	100%
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	60%
7	01	03	202		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Kelurahan Kledung Karangdalem)	Tersusunnya Dokumen Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	6 Dokumen	6 Dokumen	60%
7	01	03	202	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kledung Karangdalem	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 Unit	3 Unit	60%
7	01	03	202	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kledung Karangdalem	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	25 Pokmas/ormas	5 Pokmas/ormas	5 Pokmas/ormas	5 Pokmas/ormas	100%	5 Pokmas / Ormas	15 Pokmas / Ormas	60%
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	100%	100%	100%	100%	100%	100 %	100 %	100 %

7	01	03	202		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Kelurahan Kledung Kradenan)	Tersusunnya Dokumen Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	6 Dokumen	6 Dokumen	60%
7	01	03	202	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kledung Karangdalem	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 Unit	3 Unit	60%
7	01	03	202	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kledung Karangdalem	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	25 Pokmas/ormas	5 Pokmas/ormas	5 Pokmas/ormas	5 Pokmas/ormas	100%	5 Pokmas / Ormas	15 Pokmas / Ormas	60%
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	60%
7	01	03	202		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Kelurahan Borokulon)	Tersusunnya Dokumen Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	6 Dokumen	6 Dokumen	60%
7	01	03	202	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kledung Karangdalem	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 Unit	3 Unit	60%
7	01	03	202	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kledung Karangdalem	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	25 Pokmas/ormas	5 Pokmas/ormas	5 Pokmas/ormas	5 Pokmas/ormas	100%	5 Pokmas / Ormas	15 Pokmas / Ormas	60%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bahwa laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan meliputi LPPD, LKPJ, RLPPD, dan EPPD. Keempat tersebut disusun berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, akurasi, dan objektif. Maka dari itu setiap Perangkat Daerah harus mempunyai tolak ukur kinerja dan indikator kinerja yang akan diuji. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menegaskan bahwa Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang – undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang – undang untuk kegiatan pelayanan publik dan badan hukum lain yang dibentuk semata – mata untuk kegiatan pelayanan publik.

Pasal 14 dan 15 UU Nomor 25 Tahun 2009 mengamanatkan bahwa hak dan kewajiban penyelenggara adalah sebagai berikut :

- 1) Hak – hak penyelenggara :
 - a) Memberikan pelayanan tanpa dihambat pihak lain yang bukan tugasnya
 - b) Melakukan Kerjasama
 - c) Melakukan pembelaan terhadap pengaduan dan tuntutan yang tidak sesuai dengan kenyataan dalam penyelenggaraan pelayanan negara
 - d) Menolak permintaan pelayanan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
- 2) Kewajiban penyelenggara :
 - a) Menyusun dan menetapkan standar pelayanan
 - b) Menyusun, menetapkan dan mempublikasikan maklumat pelayanan
 - c) Menempatkan pelaksana yang kompeten
 - d) Menyediakan sarana, prasarana dan atau fasilitas pelayanan publik yang mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai.
 - e) Melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan.

Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 juga mengamanatkan pedoman dasar dalam mengelola pelayanan publik, sebagaimana tercantum pada pasal 4 yang memuat asas penyelenggaraan pelayanan publik, yaitu :

- 1) Kepentingan umum,
- 2) Kepastian hukum,
- 3) Keseimbangan hak dan kewajiban,
- 4) Professional,
- 5) Partisipatif,
- 6) Akuntabilitas.
- 7) Ketepatan waktu,
- 8) Keterbukaan,
- 9) Kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan.

Dalam rangka melaksanakan pelayanan publik, pemerintah harus sanggup melakukan pelayanan minimal, karena pemberian pelayanan ini merupakan hak dasar masyarakat selaku konsumen.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Standar Pelayanan Minimal merupakan standar dengan batas - batas tertentu untuk mengukur kinerja penyelenggaraan kewenangan wajib daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar kepada masyarakatn yang mencakup jenis pelayanan, Indikator dan nilai.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Camat Banyuurip selaku pemimpin wilayah di Kecamatan Banyuurip telah menerapkan langkah - langkah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan pendayagunaan pelimpahan sebagian kewenangan kepada Camat untuk melaksanakan pelayanan prima.
- b. Mendayagunakan aparat Kecamatan yang pintar dan berpengalaman untuk mengatasi masalah dalam pelaksanaan tugas di lapangan.
- c. Meningkatkan koordinasi intern antar Seksi untuk melaksanakan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 14 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata Kerja Kecamatan Di Lingkungan Kabupaten Purworejo
- d. Meningkatkan motivasi kerja aparat untuk mengatasi turunnya kepercayaan / legitimasi terhadap pemerintah.

Dalam Pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2025 triwulan I tentunya ada permasalahan, terdapat pada tabel berikut ini:

Tabel T-C. 30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat
Daerah Kecamatan Banyuurip Kabupaten
Purworejo

[illegible]

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah

Menurut Peraturan Bupati Purworejo Nomor 14 Tahun 2023, kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo. Camat bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah di bidang pemerintahan desa, pembangunan, ketentraman, ketertiban umum serta pemberdayaan masyarakat.

- 1) Tugas Camat dalam mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:
 - a) mendorong partisipasi Masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan Pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan Pembangunan di desa/kelurahan dan Kecamatan;
 - b) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan Masyarakat di wilayah kerja Kecamatan;
 - c) melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
 - d) melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - e) melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan Masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan Masyarakat.
- 2) Tugas Camat dalam mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi:
 - a) melakukan koordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
 - b) melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja Kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 - c) melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Bupati.
- 3) Tugas Camat dalam mengoordinasikan penerapan dan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, meliputi:
 - a) melakukan koordinasi dengan perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;
 - b) melakukan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan;
 - c) melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kecamatan dalam rangka penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan; dan
 - d) melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati.

- 4) Tugas Camat dalam mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi:
 - a) melakukan koordinasi dengan perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - b) melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum; dan
 - c) melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati.
- 5) Tugas Camat dalam mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Tingkat Kecamatan meliputi:
 - a) melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - b) melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - c) melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
 - d) melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati.
- 6) Tugas Camat dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan atau kelurahan meliputi:
 - a) melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa/ dan atau kelurahan;
 - b) memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa/ dan atau kelurahan;
 - c) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan atau lurah;
 - d) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan /atau perangkat kelurahan;
 - e) melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan / atau kelurahan di tingkat Kecamatan; dan
 - f) melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan / atau kelurahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati;

Selain melaksanakan 6 (enam) tugas, Camat juga menyelenggarakan fungsi yaitu:

1. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum;
2. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
5. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
7. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan atau kelurahan;
8. pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan

9. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengingat peran strategis kecamatan ini, maka penting untuk mendorong penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 serta berupaya melakukan peningkatan peran strategis camat.

Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :

- a. Camat
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 2. Subbagian Umum Dan Kepegawaian
- c. Seksi Pemerintahan Desa;
- d. Seksi Pembangunan;
- e. Seksi Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- f. Seksi Pemeberdayaan Masyarakat;
- g. Jabatan Fungsional; dan
- h. Kelurahan

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan program dan kegiatan prioritas yang dilaksanakan oleh Pemerintah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang beralokasi di wilayah-wilayah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Namun dalam perkembangannya, setiap tahunnya perlu diadakan review terhadap rancangan Perangkat Daerah. Review ini dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan masing-masing Perangkat Daerah. Sejalan dengan Perangkat Daerah yang mandiri dan dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat, membawa dampak yang akhirnya berpengaruh terhadap program dan kegiatan yang akan direncanakan dan yang akan dilaksanakan seperti pada table T-C 31 berikut :

TABEL T-C 31
Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2026
Provinsi/Kabupaten/Kota Purworejo

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Banyuurip

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA A		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100%	4.842.727.830	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100%	4.687.889.903	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 dokumen	18.382.300	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 dokumen	2.988.700	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Kecamatan Banyuurip	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	2.262.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Kecamatan Banyuurip	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	0 dokumen	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Kecamatan Banyuurip	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	2.262.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Kecamatan Banyuurip	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	0 dokumen	-	

	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Banyuwirip	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	2.012.400	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Banyuwirip	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0 dokumen	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Banyuwirip	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	2.012.400	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Banyuwirip	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0 dokumen	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Banyuwirip	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dokumen	4.400.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Banyuwirip	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 dokumen	-	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Banyuwirip	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 dokumen	2.457.800	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Banyuwirip	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22 dokumen	1.988.700	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Banyuwirip	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 dokumen	2.975.700	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Banyuwirip	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22 dokumen	1.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	4.287.598.830	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	4.324.045.703	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Banyuwirip	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 orang/bulan	4.283.181.130	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Banyuwirip	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 orang/bulan	4.323.545.703	

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Banyuwirip	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 laporan	2.093.200	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Banyuwirip	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0 laporan	-	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kecamatan Banyuwirip	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	26 laporan	2.324.500	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kecamatan Banyuwirip	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	26 laporan	500.000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	6.673.700	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0%	-	
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kecamatan Banyuwirip		1 dokumen	2.313.700	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kecamatan Banyuwirip		0 dokumen	-	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kecamatan Banyuwirip	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 dokumen	4.360.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kecamatan Banyuwirip	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 dokumen	-	
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Persentase Layanan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100%	2.159.500	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Persentase Layanan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100%	363.400	
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kecamatan Banyuwirip	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 dokumen	2.159.500	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kecamatan Banyuwirip	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 dokumen	363.400	

		Banyuuri P									
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	171.333.421	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	74.276.600	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Banyuuri p	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	3.940.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Banyuurip	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	3.494.500	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Banyuuri p	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	14.716.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Banyuurip		0 paket	-	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Banyuuri p	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	8.955.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Banyuurip	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 paket	6.142.400	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Banyuuri p	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	48.543.600	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Banyuurip	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 paket	22.680.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Banyuuri p	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	17.359.200	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Banyuurip	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	8.446.400	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Banyuuri p	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	5.328.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Banyuurip	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 dokumen	5.328.000	
	Penyediaan Bahan/Material	Kecamatan Banyuuri p	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 paket	41.439.621	Penyediaan Bahan/Material	Kecamatan Banyuurip	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 paket	20.555.300	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Banyuuri p	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	29.580.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Banyuurip	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	12 laporan	7.330.000	

								dan Konsultasi SKPD			
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kecamatan Banyuwirip	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	1.472.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kecamatan Banyuwirip	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	300.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Diadakan	1 jenis	40.230.800	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Diadakan	1 jenis	11.222.800	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Banyuwirip	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 unit	40.230.800	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Banyuwirip	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 unit	11.222.800	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan	2 laporan	163.812.700	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan	2 laporan	163.812.700	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Banyuwirip	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	66.972.700	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Banyuwirip	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	66.972.700	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Banyuwirip	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	96.840.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Banyuwirip	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	96.840.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	5 jenis	152.536.579	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	5 jenis	111.180.000	

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Banyuwirip	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	34.880.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Banyuwirip	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	34.880.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Banyuwirip	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 unit	31.600.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Banyuwirip	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 unit	23.700.000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Banyuwirip	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14 unit	11.614.579	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Banyuwirip	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 unit	10.750.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Banyuwirip	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	71.392.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Banyuwirip	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	38.800.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Banyuwirip	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	3.050.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Banyuwirip	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	3.050.000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	49.609.600	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	10.513.000	

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	1 dokumen	49.609.600	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	2 dokumen	10.513.000	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Banyuwirip			47.761.600	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Banyuwirip	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	5 laporan	10.355.000	
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Banyuwirip	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 dokumen	1.848.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Banyuwirip	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	158.000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	100%	1.871.260.500	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	100%	2.111.783.360	
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Hasil Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	2 dokumen	125.626.100	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Hasil Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	2 dokumen	40.357.560	
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Banyuwirip	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 lembaga	16.428.400	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Banyuwirip	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 lembaga	11.885.000	

	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Banyuurip	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7 laporan	109.197.700	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Banyuurip	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7 laporan	28.472.560	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	17.782.900	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	5.413.119	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 dokumen	17.782.900	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2 laporan	5.413.119	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Banyuurip	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 laporan	8.724.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Banyuurip	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 laporan	1.590.000	
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Banyuurip	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 laporan	9.058.900	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Banyuurip	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 laporan	3.823.119	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	56.165.600	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	10.848.000	

	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	2 dokumen	56.165.600	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	2 dokumen	10.848.000	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kecamatan Banyuurip	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 orang	19.719.200	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kecamatan Banyuurip	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 orang	1.603.200	
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Banyuurip	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 dokumen	36.446.400	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Banyuurip	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 dokumen	9.244.800	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	160.672.800	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	37.085.900	

	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Hasil Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	5 dokumen	160.672.800	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Hasil Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	8 dokumen	37.085.900	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Banyuwirip	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 dokumen	15.070.000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Banyuwirip	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 dokumen	1.795.000	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Banyuwirip	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 dokumen	58.699.500	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Banyuwirip	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 dokumen	17.360.800	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kecamatan Banyuwirip	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1 dokumen	62.732.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kecamatan Banyuwirip	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1 dokumen	3.322.800	
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kecamatan Banyuwirip	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 dokumen	8.394.900	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kecamatan Banyuwirip	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 dokumen	11.670.900	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kecamatan Banyuwirip	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1 dokumen	8.626.400	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kecamatan Banyuwirip	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1 dokumen	1.511.400	

Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kecamatan Banyuwirip	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1 dokumen	3.600.000	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kecamatan Banyuwirip	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	0 dokumen	-	
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kecamatan Banyuwirip	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 dokumen	3.550.000	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kecamatan Banyuwirip	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 dokumen	1.425.000	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Kelurahan Karangdalem)		Hasil Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	2 Dokumen	560.423.600	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Kelurahan Karangdalem)		Hasil Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	2 Dokumen	764.354.900	
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 unit	358.478.200	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 unit	636.154.900	
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 pokmas / ormas	201.945.400	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 pokmas / ormas	128.200.000	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Kelurahan Kradenan)		Hasil Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	2 Dokumen	605.790.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Kelurahan Kradenan)		Hasil Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	2 Dokumen	650.688.300	
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 unit	367.088.300	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 unit	475.688.300	
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 pokmas / ormas	238.701.700	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 pokmas / ormas	175.000.000	

	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Kelurahan Borokulon)		Hasil Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	2 Dokumen	579.420.800	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Kelurahan Borokulon)		Hasil Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	2 Dokumen	656.382.600	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 unit	347.703.200	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 unit	506.382.600	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 pokmas / ormas	231.717.600	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 pokmas / ormas	150.000.000	
					6.998.219.230					6.863.533.282	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan atau masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi dan Perangkat Daerah yang terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Banyuurip sebagai unsur penunjang Pemerintahan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah. Rekapitulasi Hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan Tahun 2026 terdapat pada tabel berikut :

TABEL T-C 32

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kabupaten Purworejo
Provinsi Jawa Tengah

Kecamatan Banyuurip

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	Penggantian Jembatan	Dusun Surobayan Rt 01 Rw 01 Desa Surejo, Kab. Purworejo		ukuran 4x8 m	
2	Alat Penerangan Jalan Umum	Desa Popongan, Kecamatan Banyuurip, Kab. Purworejo		5 titik	
3	Rehabilitasi Drainase	Selatan alfamart banyuurip sampai jembatan malangrejo, Kab. Purworejo		Ukuran 60x500 m	
4	Alat Penerangan Jalan Umum	RW 5 Sebagian RW 4 dan RW 3, Kab. Purworejo		5 titik	
5	Alat Penerangan Jalan Umum	Jalan dari Eks Terminal ke Dusun Kulon, Kab. Purworejo		5 titik	
6	Alat Penerangan Jalan Umum	Jalan Kabupaten Jl Majend Bambang Sugeng Purworejo, Kab. Purworejo		5 titik	
7	Rehabilitasi Jalan (lebar 3 m)	Dusun Borokidul RT 01 RW 03, Kab. Purworejo		Ukuran 900m	
8	Alat Penerangan Jalan Umum	Jalan Raya Lengkong - Banyuurip KM. 5, Kab. Purworejo		5 titik	
9	Alat Penerangan Jalan Umum	Jl. Majapahit Kelurahan Kledung Karangdalem, Kab. Purworejo", Kab. Purworejo		5 titik	
10	Alat Penerangan Jalan Umum	Demplo RT 001 RW 002 Desa Triwarno, Kab. Purworejo		5 titik	

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Guna mendukung tercapainya sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2026, dibutuhkan peran serta daerah dalam percepatan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran dan kemiskinan yang dapat dijabarkan ke dalam prioritas program daerah. Keselarasan program-program pembangunan di daerah dengan program prioritas Nasional/Provinsi perlu terus ditingkatkan untuk mendukung Pencapaian Sasaran Pembangunan Nasional/Provinsi.

Fungsi Kecamatan Banyuurip sebagai pusat pelayanan masyarakat merupakan ujung tombak untuk berhadapan dan memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan kualitas pelayanan maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, maka dibuat kebijakan berupa PATEN. Program PATEN merupakan wujud dari Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat.

Kecamatan Banyuurip juga mendukung program pemerintah tentang kesetaraan gender berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah. Pengarusutamaan Gender di daerah yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah. Sub Kegiatan yang di ambil Kecamatan Banyuurip dalam mendukung kegiatan PUG yaitu Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa dan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Banyuurip

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Penetapan tujuan dalam Rencana Kerja Kecamatan Banyuurip terkait dengan misi RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 terutama misi kelima yaitu:

“Meningkatkan Kualitas Layanan Kepada Masyarakat Serta Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah”

Sehubungan dengan penjabaran misi dimaksud maka dirumuskan tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan 5 (lima) tahun di Kecamatan Banyuurip adalah:

“Meningkatnya Kualitas Layanan Kepada Masyarakat”

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Kecamatan Banyuurip dalam jangka waktu satu tahun mendatang. Sesuai dengan tujuan yang telah diuraikan di atas, maka sasaran yang ingin dicapai dan dituangkan dalam Rencana Strategis dalam jangka waktu lima tahun mendatang dengan periode pembangunan 2025-2029 kemudian dituangkan dalam Rencana Kerja dalam jangka waktu satu tahun mendatang dengan periode pembangunan 2026 antara lain:

“Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah”

TABEL 3.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN
PERANGKAT DAERAH 2025-2029

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARA N	Target 2026
	(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah		Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)	82
		Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)	82
		Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	70

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Untuk mewujudkan tujuan serta sasaran Pembangunan Kabupaten Purworejo, maka pada Tahun 2026 Kecamatan Banyuurip melaksanakan 6 program, 13 kegiatan, dan 38 subkegiatan dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Subkegiatan: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- Subkegiatan: Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Subkegiatan: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- Subkegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.

Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah Kewenangan Perangkat Daerah

- Subkegiatan: pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah

Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Subkegiatan: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
- Subkegiatan: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- Subkegiatan: Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
- Subkegiatan: Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
- Subkegiatan: Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- Subkegiatan: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- Subkegiatan: Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
- Subkegiatan: Penyediaan Bahan/Material;
- Subkegiatan: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
- Subkegiatan: Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD;
- Subkegiatan:

Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Subkegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya

Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Subkegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik;
- Subkegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;

Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Subkegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
- Subkegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
- Subkegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
- Subkegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
- Subkegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

- Subkegiatan : Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada masyarakat di Wilayah Kecamatan.
- Subkegiatan : Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan.

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;

Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

- Subkegiatan : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
- Subkegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan

- Subkegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan;
- Subkegiatan : Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;

4. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;

Kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

- Subkegiatan : Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan;
- Subkegiatan : Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;

Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

- Subkegiatan : Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- Subkegiatan : Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;
Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- Subkegiatan : Fasilitasi Administrasi
 - Subkegiatan : Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa;
 - Subkegiatan : Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - Subkegiatan : Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
 - Subkegiatan : Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
 - Subkegiatan : Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
 - Subkegiatan : Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif.

Tabel T-C 33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026
Dan Perkiraan Maju Tahun 2027
Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Targe t Akhir Perio de Rens tra OPD	Realis asi Capai an RENJ A	Prakir aan Capai an Target RENJ A OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelom pok Sasara n	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumb er Dana	Prioritas			Targ et	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasio nal	Daer ah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						KECAMATAN BANYUURIP														
	7					UNSUR KEWILAYAHAN														
	7	0				KECAMATAN														
	7	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						4.687.889. 903							5.042.868.530	
	7	0	0	2.0		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					2 Dokum en	2.988.700							9.434.000	
	7	0	0	2.0	00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				22 Dokum en	1.988.700	Kab. Purworejo, Banyuurip, Semua Kel/Desa	DANA ALOK ASI UMU M (DAU)			Aparat ur		4.458.000	KECAMATA N BANYUURIP
	7	0	0	2.0	00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				22 Dokum en	1.000.000	Kab. Purworejo, Banyuurip, Semua Kel/Desa	DANA ALOK ASI UMU M (DAU)			Aparat ur		4.976.000	KECAMATA N BANYUURIP

[illegible]

[illegible]

							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 paket	6.142.400	Kab. Purworejo, Banyuurip, Semua Kel/Desa	DANA ALOK ASI UMUM (DAU)			Aparatur		11.642.700	KECAMATAN BANYUURIP
7	0	0	2.0	00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
	1	1	6	04			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 paket	22.680.000	Kab. Purworejo, Banyuurip, Semua Kel/Desa	DANA ALOK ASI UMUM (DAU)			Aparatur		50.546.000	KECAMATAN BANYUURIP
7	0	0	2.0	00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan															
	1	1	6	05			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				4 paket	8.446.400	Kab. Purworejo, Banyuurip, Semua Kel/Desa	DANA ALOK ASI UMUM (DAU)			Aparatur		19.358.400	KECAMATAN BANYUURIP
7	0	0	2.0	00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan															
	1	1	6	06			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 paket	5.328.000	Kab. Purworejo, Banyuurip, Semua Kel/Desa	DANA ALOK ASI UMUM (DAU)			Aparatur		7.328.000	KECAMATAN BANYUURIP
7	0	0	2.0	00	Penyediaan Bahan/Material															
	1	1	6	07			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				4 paket	20.555.300	Kab. Purworejo, Banyuurip, Semua Kel/Desa	DANA ALOK ASI UMUM (DAU)			Aparatur		40.922.700	KECAMATAN BANYUURIP
7	0	0	2.0	00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															
	1	1	6	09			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 laporan	7.330.000	Kab. Purworejo, Banyuurip, Semua Kel/Desa	DANA ALOK ASI UMUM (DAU)			Aparatur		31.580.000	KECAMATAN BANYUURIP

	7	0	0	2.0	00	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD												
		1	1	6	10		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			1 dokume n	300.000	Kab. Purworejo, Banyuurip, Semua Kel/Desa	DANA ALOK ASI UMU M (DAU)		Aparat ur		3.472.000	KECAMATA N BANYUURIP
	7	0	0	2.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan			1 unit	11.222.800						40.017.400	
	7	0	0	2.0	00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
		1	1	7	06		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			1 unit	11.222.800	Kab. Purworejo, Banyuurip, Semua Kel/Desa	DANA ALOK ASI UMU M (DAU)		Aparat ur		40.017.400	KECAMATA N BANYUURIP
	7	0	0	2.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2 laporan	163.812.700						167.087.100	
	7	0	0	2.0	00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												
		1	1	8	02		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 laporan	66.972.700	Kab. Purworejo, Banyuurip, Semua Kel/Desa	DANA ALOK ASI UMU M (DAU)		Aparat ur		68.679.100	KECAMATA N BANYUURIP
	7	0	0	2.0	00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												
		1	1	8	04		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 laporan	96.840.000	Kab. Purworejo, Banyuurip, Semua Kel/Desa	DANA ALOK ASI UMU M (DAU)		Aparat ur		98.408.000	KECAMATA N BANYUURIP

[illegible]

							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			3 unit	3.050.000	Kab. Purworejo, Banyuwirip, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Aparatur		5.050.000	KECAMATAN BANYUWIRIP
7	0	0					PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik		100%	10.513.000						43.848.000	
7	0	0	2.0				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		2 Dokumen	10.513.000						43.848.000	
7	0	0	2.0	00			Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan											
							Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan			5 laporan	10.355.000	Kab. Purworejo, Banyuwirip, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Aparatur		40.000.000	KECAMATAN BANYUWIRIP
7	0	0	2.0	00			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan											
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			1 laporan	158.000	Kab. Purworejo, Banyuwirip, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Aparatur		3.848.000	KECAMATAN BANYUWIRIP
7	0	0					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan		100%	40.357.560						147.626.000	

[illegible]

						Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 laporan	1.590.000	Kab. Purworejo, Banyuurip, Semua Kel/Desa	DANA ALOK ASI UMUM (DAU)			Aparatur		10.723.400	KECAMATAN BANYUURIP
	7	0	0	2.0	00	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat													
		1	4	1	02		Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			1 laporan	3.823.119	Kab. Purworejo, Banyuurip, Semua Kel/Desa	DANA ALOK ASI UMUM (DAU)			Aparatur		10.739.300	KECAMATAN BANYUURIP
	7	0	0			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			100%	10.848.000							60.165.600	
		1	5																
	7	0	0	2.0		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			2 Dokumen	10.848.000							60.165.600	
		1	5	1															
	7	0	0	2.0	00	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia													
		1	5	1	01														
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang				100 orang	1.603.200	Kab. Purworejo, Banyuurip, Semua Kel/Desa	DANA ALOK ASI UMUM (DAU)			Aparatur		21.719.200	KECAMATAN BANYUURIP

[illegible]

						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				1 dokumen	17.360.800	Kab. Purworejo, Banyuwirip, Semua Kel/Desa	DANA ALOK ASI UMUM (DAU)			Aparatur		60.739.600	KECAMATAN BANYUURIP
	7	0	0	2.0	00	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa													
		1	6	1	05		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa			1 dokumen	3.322.800	Kab. Purworejo, Banyuwirip, Semua Kel/Desa	DANA ALOK ASI UMUM (DAU)			Aparatur		64.186.200	KECAMATAN BANYUURIP
	7	0	0	2.0	00	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa													
		1	6	1	06		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa			1 dokumen	11.670.900	Kab. Purworejo, Banyuwirip, Semua Kel/Desa	DANA ALOK ASI UMUM (DAU)			Aparatur		10.599.500	KECAMATAN BANYUURIP
	7	0	0	2.0	00	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa													
		1	6	1	07		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa			1 dokumen	1.511.400	Kab. Purworejo, Banyuwirip, Semua Kel/Desa	DANA ALOK ASI UMUM (DAU)			Aparatur		10.635.600	KECAMATAN BANYUURIP
	7	0	0	2.0	00	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif													
		1	6	1	13		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan			1 dokumen	1.425.000	Kab. Purworejo, Banyuwirip, Semua Kel/Desa	DANA ALOK ASI UMUM			Aparatur		5.550.000	KECAMATAN BANYUURIP

[illegible]

[illegible]

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH

3.1. Rencana Kerja dan Pendanaan

Rencana Kerja Kecamatan Banyuurip serta Pendanaan Program dan Kegiatan Tahun 2026 didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo dapat dilihat pada Tabel 4.1 di bawah ini :

Tabel 4.1
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

NO	URUSAN	PROGRAM	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PD / KET.
1	Unsur Kewilayahan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.687.889.903	
2	Unsur Kewilayahan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	10.513.000	
3	Unsur Kewilayahan	PROGRAM PEMBERDAYAAN AMSYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.111.783.360	
4	Unsur Kewilayahan	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	5.413.119	
5	Unsur Kewilayahan	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	10.848.000	
6	Unsur Kewilayahan	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	37.085.900	
		JUMLAH	6.863.533.282	

3.2. Dukungan terhadap Nasional, Provinsi, dan Kegiatan Unggulan Daerah

Dukungan terhadap program nasional, kegiatan unggulan provinsi, dan kegiatan unggulan daerah di Purworejo, Jawa Tengah, dapat dilihat dari berbagai aspek, termasuk dukungan anggaran, kebijakan, dan promosi. Pemerintah daerah, provinsi, dan pusat saling bersinergi untuk mengembangkan potensi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Table berikut ini program dukungan dari Kecamatan Banyuurip:

TABEL 4.2
DUKUNGAN TERHADAP NASIONAL, PROVINSI, DAN KEGIATAN
UNGGULAN DAERAH

No	Program Prioritas	Aktivitas Yang Mendukung Program	Dukungan Terhadap Pitulungan/Program Prioritas Bupati	Dukungan Terhadap 35 Delegasi Provinsi	Dukungan terhadap Asta Cita/17 Prioritas Pembangunan/Quick Win
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1. Fasilitasi Pekan Olahraga Kabupaten	Menyelenggarakan tata Kelola pemerintahan yang baik, pemerintah yang bersih, berkeadilan responsive dan inovatif berbasis teknologi informasi (Misi 5 No 3)	Melahirkan Pemerintahan yang Good Clear Government dan Collaborative Governance melalui peningkatan kesejahteraan, Profesionalitas dan kualitas ASN dan perangkat desa (No 13)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan (Asta Cita No 7)
		2. Monev ODF, Stunting, posyandu, posbindu, pamsimas, monev pembangunan, PKH/TKSK, Pendidikan			Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi (Program Prioritas No 3)
		3. PATEN			Menaikkan Gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga Kesehatan dan penyuluh), TNI, POLRI dan Pejabat Negara (quick win no 6)
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1. Monitoring survey kepuasan masyarakat			
		2. Fasilitasi kesejahteraan sosial dan PKH, Fasilitasi pekan olahraga, forum kesehatan desa/kelurahan, koordinasi percepatan penurunan stunting,			

		pembinaan DPO			
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Musrenbang Kecamatan			
		2. Kegiatan TP PKK tingkat Kecamatan			
		3. Sosialisasi Kegiatan Kepemudaan, Olahraga, Kesenian dan Keagamaan - (GSIB, Kecamatan Layak Anak (KLA), Karang Taruna, BUMDes/BUM Desma, OVOP KUBE, Pembinaan Karangtaruna, Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat			
		4. Pameran UMKM Kecamatan Banyuurip			
		5. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			
		6. Pemberdayaan Kelurahan			
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1. Koordinasi Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Alam			
		2. Kegiatan Linmas/Kamtibmas			
		3. Kegiatan LPTQ			
		4. Monitoring Pilkada/Pileg/Pilpres			
5	PROGRAM PENYELENGGAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra)			
		2. Konferensi Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	1. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa			
		2. Koordinasi percepatan pengajuan DD, Pembinaan pelaksanaan dana desa, Percepatan LRA DD, Rakor percepatan			

		ADD dan Penelitian SPJ ADD, Sosialisasi perubahan APBDes, sosialisasi APBDes, pelaporan realisasi APBDes, pendampingan APBDes, pendampingan perubahan APBDes			
		3. Konferensi Kades/Kalur, Konferensi sekdes/seklur			
		4. Pembinaan BPD			
		5. Fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa			
		6. Rakor penyusunan RKPDes			

3.3. Sasaran Program dan Keluaran Kegiatan

Berdasar Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).

Untuk mengetahui tingkat capaian keberhasilan apakah kegiatan yang terlaksana telah sesuai dengan rencana, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.2
Sasaran Program dan Keluaran Kegiatan

NO	PRGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KELUARAN KEGIATAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
4	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Diadakan

7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintaah Daerah yang Disediakan
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara
9	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
10	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
11	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
12	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Hasil Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
13	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Hasil Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
14	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
15	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
16	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
17	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
18	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
19	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Hasil Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Kecamatan Banyuurip Tahun 2026 ini merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Banyuurip Tahun 2025-2029. Pada Tahun 2026, Rencana Kerja Kecamatan Banyuurip terdapat 6 program, 13 kegiatan, dan 38 subkegiatan. Perkembangan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026 dapat terjadi perubahan disebabkan adanya kebijakan-kebijakan baru, kebutuhan atau adanya peraturan-peraturan baru, maka dimungkinkan untuk dilakukan perubahan dengan mekanisme diusulkan kembali sesuai ketentuan yang berlaku. Rencana Kerja ini akan dipakai sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas tahun 2026, khususnya dalam menyusun Rencana Kerja Tahun Anggaran 2026 dan untuk mengidentifikasi perkiraan sumberdaya dan dana pembangunan.

Rencana Kerja Kecamatan Banyuurip Tahun 2026 diharapkan dapat mewujudkan sinergitas, efisiensi dan efektifitas perencanaan alokasi sumberdaya dalam pembangunan daerah.

5.1 Catatan Penting

Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja Rencana Kerja Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo Tahun 2026 berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun berdasarkan arah dan tujuan Rencana Pembangunan jangka Menengah Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029. Selain itu Rencana Kerja juga sebagai landasan operasional perencanaan taktis tahunan yang isinya lebih memusatkan pada arah, tujuan, sasaran, program dan kegiatan jangka pendek.

Rencana Kerja sebagai dokumen perencanaan, memuat program dan kegiatan prioritas yang harus dijalankan dan diarahkan pada proses perencanaan dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang berkualitas dan profesional dengan ditunjang sumber daya manusia yang berpikir sistematis/rasional, produktif, berdisiplin, bekerja efisien dan efektif.

5.2 Kaidah-Kaidah

Dalam pelaksanaan Renja PD tahun 2026, Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo memperhatikan kaidah-kaidah sebagai berikut :

1. Memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2024
2. Masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya
3. Tujuan yang dikehendaki
4. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya
5. Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan.
6. Dokumen Renja Sebagai salah satu dasar penyusunan RKA-PD dengan memperhatikan ketersediaan Anggaran yang ada

5.3 Rencana Tindak lanjut

Langkah-langkah yang ditempuh dalam upaya pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerjanya antara lain sebagai berikut:

1. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin kompleks, Upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bintek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencanaan.
2. Aparatur perencanaan yang ada saat ini dari sisi kuantitas masih kurang, hal tersebut akan berakibat bertumpuknya suatu pekerjaan pada seseorang, sehingga perlu menambah pegawai supaya rasio pekerjaan dan jumlah pegawai bisa berimbang.
3. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif di dalam melaksanakan koordinasi dengan SKPD, agar proses pembangunan yang dilaksanakan agar berdaya guna dan berhasil guna.
4. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, sehingga transparansi akan lebih terwujud
5. Terwujudnya perubahan paradigma pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan.

6. Terbangunnya kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban sebagai warga negara, terwujudnya mekanisme kontrol dari anggota maupun kelompok masyarakat yang lebih terbuka dan bertanggung jawab tentang penyelenggaraan pemerintahan.
7. Terwujudnya partisipasi aktif masyarakat/swasta dalam kegiatan pembangunan.

Demikian penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026 Kecamatan Banyuurip diharapkan dapat menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2026 mendatang.

